# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Persekolahan yaitu salah satu sarana dalam memajukan suatu negara, semakin banyak sifat pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu negara maka akan semakin baik pula sifat negara tersebut (Kusnandar 2007). Dengan sekolah, seorang individu dibekali dengan berbagai informasi, kemampuan, keterampilan, dll. Di Indonesia, pendidikan difokuskan pada, karena pelatihan memainkan peran penting dalam pengakuan pembangunan negara yang mulia. Arti penting persekolahan sangat penting sehingga motivasi di balik pelatihan telah jelas diarahkan dalam UU Sistem Persekolahan Umum, tepatnya Nomor 20 th. 2003 pasal 3.

Bagian keuangan dan pendanaan sekolah yakni bagian penciptaan, yang menentukan pelaksanaan latihan pendidikan dan pembelajaran di sekolah di samping bagian-bagian yang berbeda. Secara keseluruhan, segala jenis pergerakan di sekolah membutuhkan uang tunai, baik sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, aset-aset yang dituntut oleh sekolah harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan secara tepat dan ideal untuk membantu tercapainya tujuan edukatif. Mengkoordinasikan pengajaran, uang dan dukungan yakni potensi yang sangat definitif yang yaitu bagian luar biasa dari penyelidikan sekolah para eksekutif. Sekolah mempunyai kewenangan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi dana. Dipercaya bahwasannya aset yang berputar bisa dimanfaatkan secara ideal untuk membantu inisiatif yang didukung pembayar pajak dalam pemerataan sekolah.

Otoritas publik umumnya merancang upaya yang berbeda untuk mencapai jawaban untuk masalah penyampaian pelatihan yang setara. Salah satu jawaban otoritas publik untuk sirkulasi setara pelatihan yakni dengan memberi program distribusi rencana pengeluaran yang disebut Program Bantuan Fungsional Sekolah (BOS). Bantuan Aset Fungsional Sekolah yang diperingati UUD 1945 dalam Pedoman Pendeta Diklat dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 th. 2019 mengenai Ketentuan Khusus Bantuan Aset BOS th. 2019 yakni untuk membutuhas akses dan sifat diklat menjadi satu. dari kebutuhan pergantian peristiwa publik, untuk mendesak otoritas publik untuk mengawasi sekolah. untuk daerah dengan pembagian aset Bantuan Fungsional Sekolah (BOS) sesuai dengan tujuan dan sasaran. Program Bantuan Fungsional Sekolah juga yaitu program publik di bidang pelatihan yang menyimpan anggaran belanja yang sangat besar dan langsung dikaitkan dengan keberadaan wilayah yang lebih luas sehingga bisa memfasilitasi beban wilayah yang lebih luas. Program BOS dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap dukungan sekolah dalam jangka waktu 12 (dua belas) kali pelatihan yang dibutuhkan.

BOS ditetapkan pada bulan Juli 2005 dengan kelengkapan administrasi dengan memperhatikan standar: kemampuan beradaptasi, kecukupan, kecakapan dan tanggung jawab. Adaptabilitas yakni administrasi keuangan BOS di sekolah sesuai kebutuhan asli di sekolah, kelangsungan hidup yakni cadangan BOS. Cadangan BOS diharapkan memberi hasil, dampak dan efektivitas yang mengarah pada pencapaian tujuan pengajaran sekolah, produktivitas, khususnya pemanfaatan cadangan BOS disederhanakan karena alasan untuk bekerja pada sifat kemajuan siswa namun dengan biaya yang bisa diabaikan, tanggung jawab,

khususnya pemanfaatannya bisa diwakili.

Namun, masih ada masalah terkait dengan cadangan BOS. Seperti yang disampaikan Kemendikbud.go.id dalam Perubahan Aset BOS Para Pelaksana: Lebih Beradaptasi, Bertanggung Jawab, dan Lugas 17 Desember 2021, Ketua Umum Jumieri, STP., Msi dan Kepala Anwar mengungkapkan masih ada keluhan terkait alokasi dana BOS tersebut. cadangan BOS.

Di dasarkan survey awal yang dilaksanakan beberapa  pada kepala sekolah Di Kecamatan Buleleng dan salah satu orangtua siswa terkait pengelolaan dana BOS, yang ternyata benar bahwasannya masih terbisa kendala terkait dana BOS. Bapak Ida Bagus Soma Putra selaku Kepala Sekolah SD N 3 Banjar jawa menyebutkan bahwasannya "Masih sering terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana BOS ke rekening sekolah" penyampaian serupa juga dinyatakan oleh seluruh kepala sekolah yang di survey, selain itu beliau juga menyampaikan bahwasannya pihak pengelola dana BOS masih kesulitan dalam memakai teknologi informasi mengingat anggota pengelola dana BOS sudah masuk kedalam golongan tua. Pemaparan lainya juga disampaikan oleh bapak I Made Sukarsa yang selaku Kepala Sekolah di SD N 5 Kampung Baru menyebutkan bahwasannya " Pihak pengelola dana BOS masih kesulitan dalam menentukan skala prioritas atas dana yang dibisakan". Pemaparan lainya juga disampaikan oleh Ibu Gusti Nyoman Reniasih selaku Kepala Sekolah di SD N 1 Banjar Jawa menyebutkan bahwasannya "masih kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas dana BOS yang dibisakan karena pengetahuan akuntansi yang minim sehingga tidak jarang kekurangan waktu dalam pembuatan laporan pertanggung jawabanya". Pemaparan lainya juga disampaikan oleh Ibu Luh Eka selaku orang

tua siswa bahwasannya “beliau tidak mengetahui atas dana yang dimiliki oleh pihak sekolah karena minimnya akses informasi yang diberi oleh pihak sekolah”.

Mengingat konsekuensi dari tinjauan pokok yang dipimpin, para analis memusatkan perhatian pada Tanggung jawab untuk mengawasi cadangan BOS, Tanggung Jawab Dewan Aset BOS, khususnya pemanfaatan biaya sekolah bisa direpresentasikan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan siap untuk mengumpulkan tanggung jawab. laporan sebagai pembukuan yang lengkap disertai dengan arsip pendukung. Laporan yang harus disiapkan oleh sekolah yakni RKAS (Rencana Gerakan Rencana Keuangan Sekolah), buku uang umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku raport sumber, buku rekanan biaya, catatan lain yang dibutuhkan agar bisa menyampaikan laporan pada wali/daerah setempat. serta memberikan pertanggungjawaban subsidi BOS yang diawasi oleh sekolah tepat waktu. Pemerintahan Buleleng dikenal sebagai kota latihan. Hal ini tergantung pada sejumlah besar lembaga pendidikan di dekatnya. Pelaksanaan eksplorasi di Kabupaten Buleleng ini, khususnya di Kecamatan Buleleng, tergantung dari banyaknya jumlah yayasan edukatif di Kecamatan Buleleng yang paling kontras dengan Kecamatan lain di Wilayah Bali. Dengan jumlah 80 sekolah dasar, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1.1**
**Data Jumah Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng**

| No. | KECAMATAN | SD SEDERAJAT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NEGERI | SWASTA | JML |
| | **TOTAL** | 463 | 29 | 492 |
| 1 | Kec. Gerokgak | 48 | 10 | 58 |
| 2 | Kec. Seririt | 50 | 4 | 54 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 45 | 0 | 45 |
| 4 | Kec. Banjar | 59 | 1 | 60 |
| 5 | Kec. Sukasada | 59 | 4 | 63 |
| 6 | Kec. Buleleng | 70 | 10 | 80 |

| No. | KECAMATAN | SD SEDERAJAT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NEGERI | SWASTA | JML |
| 7 | Kec. Sawan | 46 | 0 | 46 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 45 | 0 | 45 |
| 9 | Kec. Tejakula | 41 | 0 | 41 |

(Sumber :Kemendikbud.go.id)

Di dasarkan Tabel. 1.1 memperlihatkan bahwasannya Kecamatan Buleleng yaitu kecamatan yang mempunyai sekolah dasar terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 80 Sekolah Dasar yang terdiri dari 70 Sekolah Dasar Negeri dan 10 Sekolah Dasar Swasta. Menurut Made Astika selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwasannya dari 80 sekolah di Kecamatan Buleleng tersebut terbisa 4 Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng yang termasuk ke dalam 37 sekolah di Kabupaten Buleleng yang diputuskan untuk di *regrouping*, dikarenakan untuk menghindari kekurangan sumber daya manusia Kepala Sekolah lagi selain itu diharapkan dengan adanya *regrouping* bisa membuat tata kelola manajerial sekolah menjadi lebih baik, mengingat sekolah-sekolah yang digabung selama ini masih ada dalam 1 halaman. Sehingga terbisa 76 sekolah yang masih aktif menerima dana BOS

Jumlah sekolah dasar tersebut tentunya bisa berpengaruh terhadap dana BOS yang diberi pemerintah yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh pihak sekolah melalui sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) Permendikbud Nomor 8 th. 2021 yang menyebutkan dana BOS cair secara serentak per kabupaten. Sehingga banyaknya sekolah yang ada di kecamatan Buleleng mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana BOS yang yaitu bagian penting terhadap proses penyaluran / pencairan dari alokasi dana BOS seperti yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NO.6 th. 2021 terkait penyaluran dana BOS

reguler pada pasal 8.

Teori terkait keagenan *(agency theory)* yaitu sebagai acuan saat memaknai akuntabilitas publik dalam bentuk kewajiban dari entitas pemerintah menjadi pihak pemegang amanah, pihak sekolah yang diberi pertanggungjawaban dalam mengelola dana BOS. Pihak pengelola dana BOS sekolah yaitu sebagai agen yang meberikan pertanggungjawaban, berupa pengelolaan, penyajian, pelaporan dan pengungkapan atas semua kegiatan yang terjadi terkait dana BOS yang sudah menjadi tanggung jawabnya guna terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Sehingga bisa mencapai laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan yang yaitu bagian dari akuntabilitas, dimana akuntabilitas ini yaitu faktor yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan pengelola dana BOS

Di Area Sekolah, pembukuan memainkan peran dan kemampuan sebagai pemasok data yang berguna untuk mengejar pilihan keuangan di lembaga pendidikan. Memahami pedoman pembukuan yaitu salah satu aspek penting dalam administrasi keuangan, karena norma pembukuan akan mempermudah pengawasan dana sekolah. Seperti yang ditunjukkan oleh Yuliani (2010) tinggi rendahnya kualitas laporan moneter bisa disebabkan oleh pemahaman prinsip-prinsip pembukuan area publik dari pertemuan-pertemuan yang membuat ringkasan fiskal itu sendiri. Laporan keuangan yang telah disusun oleh sekolah kemudian menjadi sarana utama bagi daerah untuk mengarahkan dan mengambil bagian dalam pengelolaan cadangan BOS. Selanjutnya, keterampilan SDM sebenarnya harus menguasai dan menguasai latihan pembukuan untuk pertanggungjawaban cadangan BOS. Norma pembukuan akan mempengaruhi

sifat laporan keuangan sekolah yang akan dipakai sebagai semacam perspektif untuk menetapkan pilihan tambahan, khususnya kewajiban (Tanggung Jawab) mengawasi cadangan BOS. Uji banding juga dilakukan oleh Heru (2020) yang mengungkapkan hasil eksplorasinya bahwa pemahaman norma pembukuan membuat perbedaan positif yang sangat besar. mengenai sifat laporan moneter di pemerintahan yang dikelola negara bagian terdekat.

Laporan pertanggungjawaban pen/sahaan subsidi BOS harus dibuka secara efektif oleh berbagai pihak karena merupakan kebutuhan dalam melaksanakan tanggung jawab pen/sahaan cadangan BOS, baik pihak internal maupun pihak luar. Keterbukaan laporan moneter, khususnya kemudahan bagi nasabah ikhtisar fiskal untuk memperolehkan laporan moneter atas pen/sahaan cadangan BOS. Sekolah harus memiliki pilihan untuk memberikan penerimaan sederhana pada klien laporan fiskal, tidak hanya untuk organisasi pengatur dan badan administrasi tetapi juga masyarakat yang percaya sekolah sebagai pelaksana keuangan publik sebagai cadangan BOS. Oleh karena itu sekolah sebagai unsur perincian untuk situasi ini harus memberikan penerimaan terhadap pengungkapan data yang berhubungan dengan ringkasan anggaran yang diperkenalkan, konsekuensi tanggung jawab terkait dengan pencapaian / kekecewaan administrasi keuangan ke daerah baik secara langsung maupun ditangani oleh mitra dari sekolah dan bisa disampaikan melalui pertemuan / lembar rilis / hiburan berbasis web, misalnya, tandan WhatsApp di antara sekolah dan wali. Dengan tujuan agar daerah bisa ikut mengatur / memberikan pertimbangan dalam memutuskan.

Demikian juga, bisa membuat pengawas toko BOS lebih berhati-hati dalam memasukkan data yang terkait dengan ringkasan fiskal yang diperkenalkan

yang penting untuk tanggung jawab cadangan BOS dewan. mengenai tanggung jawab pen/sahaan keuangan daerah dan akibat dari penjajakan Sari (2019) mengungkapkan bahwasannya keterbukaan laporan keuangan pada hakekatnya mempengaruhi tanggung jawab pen/sahaan keuangan provinsi SKPD Kota Lhokseumawe.

Pemanfaatan inovasi data juga sangat berdampak pada tanggung jawab penyimpanan BOS para pelaksana sesuai (Suparman, 2014) pemanfaatan inovasi data sebagai PC membantu sekolah dalam mengawasi cadangan BOS, termasuk penanganan informasi, penanganan data, kerangka kerja dewan dan proses kerja secara elektronik. Selain itu pemanfaatan data kemajuan mekanis dengan tujuan agar administrasi publik bisa dibisakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat pada umumnya. Penggunaan inovasi data ini akan membatasi kesalahan, karena semua kegiatan administrasi keuangan akan lebih direkam dengan hati-hati dan pada akhirnya ingin menghasilkan laporan yang berkualitas karena mereka bisa menghitung dengan tepat dan mengumpulkan laporan keuangan dalam waktu yang lebih cepat. Ahli untuk komitmen ini untuk menuntut data dan tanggung jawab. Sehingga pemanfaatan inovasi sebesaran-besarnya akan mempengaruhi tanggung jawab cadangan BOS.

Dengan inovasi, akan lebih mudah untuk membuat laporan moneter dan menyampaikan data. Penjelasan di atas juga didukung oleh hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh (Adelia 2022) yang menyebutkan bahwasannya pemanfaatan inovasi data sampai batas tertentu dan secara keseluruhan mempengaruhi kewajiban mengenai pengawasan aset kota dan hasil eksplorasi (Merlina 2021), menyebutkan bahwasannya pemanfaatan inovasi data mempengaruhi tanggung

jawab dewan penyimpanan kota, ( Sopian 2022) Inovasi data, baik sedikit-sedikit / sekaligus, sama-sama mempengaruhi tanggung jawab cadangan BOS para eksekutif

Kebaruan dalam pemeriksaan ini yakni bekerja sama dengan investigasi masa lalu yang memiliki faktor-faktor yang terkait dengan masalah yang ditemukan oleh para analis saat memimpin tinjauan yang mendasarinya. Dengan menyempurnakan Riset yang dilaksanakan oleh (Sopian 2022) yang hanya memfokuskan pada pihak internal saja dan pada Riset ini yakni mengambil variabel teknologi informasi dan menambahkan 2 variabel lainya. Yaitu Standar Akuntansi dan Aksesibilitas yang dibisakan dari kolaborasikan dengan Riset yang dilaksanakan oleh (Erawati,2018) yakni mengambil variabel pemahaman standar akuntansi. Pemahaman standar akuntansi tersebut akan sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dana BOS dari segi pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berkualitas. Pada Riset (Mawaddah 2019) yakni mengambil variabel aksesibilitas, aksesibilitas laporan keuangan yaitu kemudahan dalam memperolehkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak pengelola dana BOS yang yaitu dari bukti pertanggungjawabanya, selain itu adapun keterbaruan dalam Riset ini yaitu pada lokasi Riset yaitu Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng.

Di dasarkan dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk menguji Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Aksesibilitas, Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar Kecamatan Buleleng. Oleh karena itu, Peneliti memutuskan untuk melaksanakan Riset dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Aksesibilitas dan Teknologi**

**Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Di dasarkan uraian latar belakang tersebut, maka apat diidentifikasi masalah yang muncul:

1. Masih kurang ketepatan waktu dalam pencairan dana BOS ke sekolah.
2. Masih kurangnya waktu dalam pembuatan laporan terkait pengelolaan dana BOS
3. Masih kurangnya pengetahuan mengenai Pemahaman Standar Akuntansi
4. Kurang partisipasi orang tua siswa/masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan Dana BOS
5. Kurangnya akses yang diberi oleh pihak internal terkait laporan keuangan dana BOS
6. Kesulitan dalam menentukan sekala prioritas atas dana yang di bisakan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pada pemaparan terkait permasalahan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang di uraikan, penulis memberi fokus Riset pada pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Aksesibilitas dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolan Dana BOS dengan subjek Riset yakni Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng.

## 1.4 Rumusan Masalah

Di dasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Riset ini yakni:

1. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruhTeknologi Informasi terhadap Pengelolaan Akuntabilitas Dana BOS pada SD di Kecamatan Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannnya Riset ini yakni untuk mengetahui beberapa hal-hal berikut, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman Standar Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari Riset ini diharapkan bisa memberi manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis berikut ini:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari Riset ini diharapkan bisa menjadi referensi sbagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis sehingga bisa membutuhas wawasan ilmu terutama dalam mata kuliah akuntansi dan ekonomi. Selain itu, Riset ini juga diharapkan bisa berkontribusi dalam Riset selanjutnya dan bisa dipakai sebagai bahan Riset sejenis serta dalam memperkuat Riset sebelumnya.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis.

Riset ini bisa membantu penulis dalam menambah pengetahuan / wawasan terutama pada pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Aksesibilitas dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas pengelolan dana BOS.

b. Bagi penanggungjawab penggelolaan dana BOS.

Riset ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan pada penanggungjawab pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar di kecamatan Buleleng sehingga bisa meminimkan terjadinya keterhambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana BOS yang yaitu tanggungjawab dari pengelola dana BOS sekolah.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha.

Hasil dari Riset ini diharapan bisa menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Aksesibilitas dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas pengelolan dana BOS.